

**PEMBINAAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA PENGAJARAN PPKN
MELALUI BEBERAPA PENDEKATAN PENDIDIKAN NILAI**

ABSTRAK

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai sentral yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang majemuk dalam menyikapi tantangan global. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu nilai-nilai ini harus ditanamkan pada generasi muda melalui pengajaran di kelas PPKn sebagai bagian integral dalam setiap kurikulum pada setiap jenjang pendidikan merupakan salah satu cara untuk membina nilai-nilai tersebut melalui proses belajar di sekolah. Tujuan pengajaran PPKn adalah untuk membina beberapa pendekatan pendidikan nilai. Beberapa pendekatan tersebut ada delapan, yaitu: (a) *role playing*, (b) *simulation*, (c) *award*, (d) *group decision making*, (e) *case study*, (f) *debate*, (g) *the use of mass media*, dan (h) *community service*.



**Makalah disajikan pada Seminar Nasional
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu
Pada tanggal, 5 September 2007**

PENDAHULUAN

Tatanan kehidupan yang demokratis tentu saja membutuhkan budaya demokrasi untuk pembuatnya tetap tegak dan kokoh (*establish*). Budaya demokrasi itu sendiri merupakan nilai-nilai sentral yang harus dimiliki, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Semakin tinggi tingkat apresiasi dan penghayatan nilai-nilai tersebut, maka akan semakin tumbuh subur perkembangan demokrasi dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan instrumen yang dapat digunakan dalam menwariskan dan mengembangkan nilai-nilai dan budaya demokrasi kepada generasi mudanya.

Oleh

PUSPA DJUWITA

Dalam perspektif demokrasi, instrumen yang lazim dikenal sebagai pembawa, penyalur, dan sekaligus penguat nilai dan budaya demokrasi adalah partai-partai politik (*political parties*). Dalam konteks ini, para politisi dan pemimpin negara merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat agar memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan.

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
BENGKULU 2007**

Penghargaan

Diberikan Kepada :

Dr. Puspa Juwita, M.Pd.

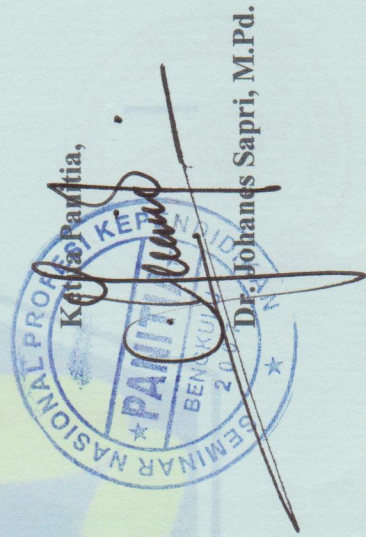
sebagai

PEMAKALAH

Dalam

**SEMINAR NASIONAL IMPLEMENTASI PROGRAM KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI GURU
"Guru, Mutu, dan Pembangunan Bangsa"**

Diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu
Bengkulu, 5 September 2007





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PANITIA SEMINAR NASIONAL**

Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu, Telepon 21186, Faksimil (0736) 21186

Nomor : 09/J30.1.2/Panpel/LL/2007

13 Agustus 2007

September 2007

Lamp : -

Hal : Permohonan Menjadi Pemakalah

Yth . Bapak/Ibu Puspa Nurwita, M.Pd
Di Bengkulu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya Seminar Nasional dengan tema "*Implementasi Program Kualifikasi dan Sertifikasi Guru*" di Universitas Bengkulu pada :

Hari/Tanggal : Rabu/5 September 2007
Waktu : 08.30 s.d. 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Utama Rektorat UNIB

Maka dengan ini kami mengharapkan Bapak/Ibu **menjadi Pemakalah** pada acara Seminar Nasional tersebut. Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, dimohon kehadiran bapak/Ibu tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Dr. Johannes Sapri, M.Pd.
NIP 131477132

PEMBINAAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA PENGAJARAN PPKn MELALUI BEBERAPA PENDEKATAN PENDIDIKAN NILAI

ABSTRAK

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai-nilai sentral yang harus tetap kokoh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam menyokong tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu nilai-nilai ini penting untuk dididikan pada generasi muda melalui pengajaran di kelas. PPKn sebagai bidang studi yang wajib dalam setiap kurikulum pada setiap jenjang pendidikan merupakan wahana yang berguna untuk membina nilai-nilai tersebut melalui proses belajar di sekolah. Dalam mencapai tujuan pengajaran PPKn pendidik dapat memanfaatkan beberapa pendekatan dan strategi pendidikan nilai. Beberapa pendekatan tersebut ada delapan, yaitu: (a) *evocation*, (b) *inculcation*, (c) *awareness*, (d) *moral reasoning*, (e) *analysis*, (f) *value clarification*, (g) *the union approach*.

Kata kunci; *pembinaan, pendekatan pendidikan nilai, demokrasi, PPKn*

PENDAHULUAN

Tatanan kehidupan yang demokrasi tentu saja membutuhkan budaya demokrasi untuk membuatnya tetap tegak dan kokoh (*establish*). Budaya demokrasi itu sendiri merupakan nilai-nilai sentral yang harus hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Semakin tinggi tingkat apresiasi dan pengamalan nilai-nilai tersebut, maka akan semakin tumbuh subur perkembangan demokrasi dalam masyarakat. Untuk itu, suatu masyarakat memerlukan instrumen yang dapat digunakan dalam mewariskan dan mengembangkan nilai-nilai dan budaya demokrasi kepada generasi mudanya.

Dalam perspektif demokrasi, instrumen yang lazim dikenal sebagai pembawa, penyalur, dan sekaligus pengembang nilai dan budaya demokrasi adalah partai-partai politik (*political parties*). Dalam konteks ini, para politisi dan pemimpin negara merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat agar memahami, menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai dan budaya demokrasi dalam kehidupan.

Selain partai-partai politik, institusi yang berpotensi besar dalam memberikan pemahaman dan mendidihkan nilai dan budaya demokrasi kepada masyarakat adalah institusi pendidikan. Pendidikan bisa memainkan sebuah peran penting dalam mendidik dan melatih masyarakat untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggungjawab dalam mempraktikkan demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana vital untuk menumbuh kembangkan nilai dan kultur demokrasi, dikarenakan pendidikan berhubungan dengan proses penyampaian, penanaman, pembinaan dan pengembangan nilai-nilai. Karenanya, pendidikan juga merupakan *political institution*. Melalui pendidikan akan dihasilkan warga negara yang bebas, mandiri, kritis, dan memahami prinsip-prinsip demokrasi. Lewat pendidikan seseorang dididik untuk berdisiplin, bertanggung jawab, berpikir kritis, menghargai harkat dan martabat manusia, jujur, terbuka, toleran, taat pada hukum, apresiatif terhadap perbedaan pendapat, mampu mengambil keputusan terbaik untuk diri dan masyarakatnya.

Jika institusi pendidikan berhasil menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, maka suatu masyarakat bisa berharap kehidupan bangsanya di masa depan akan berkembang ke arah yang demokratis. Sebab, peserta didik yang berasal dari berbagai institusi pendidikan itulah nantinya yang akan hidup dan mengambil peran dalam kehidupan masa depan. Akan tetapi, jika institusi pendidikan gagal dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, maka kehidupan masyarakat akan merosot kembali ke arah masyarakat feodalistik, autokratis, dan otoriter (Bukhari, 2001:65).

Bila dicermati gejala kehidupan masyarakat saat ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan kita belum berhasil - andaikata tidak bisa dikatakan gagal - mengembangkan nilai-nilai demokrasi, seperti kesopansantunan, egaliter, terbuka, saling pengertian, tanggung jawab, disiplin, kebersamaan, dan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak azasi manusia. Menurut Maarif (Zamroni, 2000:ix), realitas sejarah di Indonesia menunjukkan betapa institusi pendidikan dijadikan 'alat' untuk melanggengkan kekuasaan. Sistem pendidikan yang bersifat sentralistik dan menekankan uniformitas ternyata telah 'mematikan' keberanian para peserta didik untuk mengambil inisiatif dan prakarsa, tidak berani mengajukan pendapat dan menanggung resiko, tidak siap berargumentasi dan berbeda pendapat, dan tidak mampu hidup bersama dalam suasana keberagaman. Mencermati hal ini, Suparmo (2000:79) bahkan menyatakan bahwa

pendidikan kita masih banyak menghasilkan manusia yang ikut-ikutan emosional dalam menghadapi persoalan masyarakat, mudah berkelahi dan berperang, menjarah orang lain, dan sulit menghargai gagasan yang berbeda. Mereka belum dapat hidup berdemokrasi dengan orang lain. Karenanya, sejak bergulirnya proses reformasi justru terjadi berbagai kasus tindak kekerasan, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan kecenderungan kurang mampunya masyarakat untuk hidup bersama dalam suasana kebebasan dan demokrasi.

PERMASALAHAN

Pendidikan kita memiliki jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan atas, dan jenjang pendidikan tinggi. Di sekolah anak didik menerima seperangkat program pendidikan yang terdiri dari berbagai macam pengetahuan dasar dalam rangka mempersiapkan anak didik menjadi manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan dasar. Dari perangkat pengetahuan yang diterima anak didik, salah satu mata pelajaran atau bidang studi yang wajib ada dalam kurikulum disetiap jenjang pendidikan adalah bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui bidang studi inilah pendidikan nilai dididikan dan diinternalisasikan dalam pribadi anak didik. Nilai-nilai persamaan hak, kebersamaan, perdamaian, hak-hak asasi, disiplin, kejujuran, toleransi dan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan lainnya.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan, pembelajaran PPKn belum menunjukkan upaya yang optimal dalam pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum, yaitu mendidik anak menjadi warga masyarakat, warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan ini terjadi karena para pendidik belum mengelola pembelajaran PPKn sebagaimana mestinya. Dalam proses pembelajarannya tidak melibatkan berbagai sumber belajar, belum memanfaatkan pendekatan dan startegi pembelajaran yang sesuai dengan misi pengajaran PPKn. Untuk itu masalah yang akan dikemukakan dalam bahasan ini adalah pendekatan dan strategi pembelajaran apa saja yang dapat dimanfaatkan pendidik dalam membina dan menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan nilai pada anak merupakan suatu proses yang bertahap sesuai dengan tahap pertumbuhan kepribadiannya. Melalui tahapan pertumbuhan, anak dihadapkan pada isu-isu nilai. Selanjutnya anak akan menjajaki nilai-nilai tersebut sesuai dengan tahap pertumbuhan yang dialaminya. Setiap tahapan yang dialami akan berdampak pada perkembangan perilaku. Piaget mengemukakan bahwa anak mengalami perkembangan melalui empat tahap pertumbuhan nalar yaitu, *sensorimotor*, *preoperasional*, *concrete operasional* dan *formal operasional* (Bybe and Sund, 1982: 10). Masing-masing tahap ini terkait dengan usia dan cara berpikir yang berbeda secara kualitatif. Perkembangan mental dari tahap yang satu ke tahap yang lebih tinggi merupakan kondisi yang diperlukan untuk mengubah atau meningkatkan tahap perkembangan nilai, moral dan perilaku anak. Bersamaan dengan pertumbuhan kepribadian itu, anak menumbuhkan nilai-nilai dalam dirinya. Piaget membagi tahapan ini dalam tahap *heteronomy* dan *autonomy*. Pada tahap *heteronomous* anak cenderung menerima begitu saja aturan-aturan yang diberikan oleh orang-orang yang dianggap kompeten. Sedangkan pada tahap *autonomus*, anak sudah memiliki pemikiran memodifikasi aturan-aturan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Seperangkat nilai diperoleh anak melalui pengalaman hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dari pengalaman berinteraksi itu, ia menerima nilai-nilai dan penerimaan nilai dilakukan melalui poses memilih, menghargai dan melakukannya melalui perbuatan. Proses memperoleh nilai tersebut menurut Fraenkel (1977: 32), proses penerimaan nilai hingga menjadi milik pribadi ditempuh seseorang melalui tiga langkah. Tiap-tiap langkah terdiri atas beberapa bagian yaitu: (1) memilih, secara bebas, dari beberapa alternatif pilihan, dan dengan mempertimbangkan konsekuensi setiap alternatif, (2) menghargai, menjunjung tinggi, dan merasa bahagia dengan pilihan itu. Selanjutnya menyatakan dan mempertahankannya di depan umum, (3) berbuat dengan melaksanakan dan menerapkan nilai itu dalam perbuatan dan melakukannya berulang-ulang sebagai pola kelakuan.

Aktivitas pendidikan nilai membutuhkan sarana pendukung berupa sumber dan media sebagai faktor yang tidak dapat diabaikan. Sumber dan media yang terdapat di lingkungan dapat dimanfaatkan pendidik dalam mengelola pembelajaran di kelas. Sumber dan media pembelajaran dapat berbentuk fisik dan nonfisik. Sosok pribadi semua pendidik dan warga masyarakat adalah sumber dan media fisik. Sedangkan sumber dan media nonfisik adalah segala tindakan, sikap, perilaku, ucapan, media elektronik (Radio, *Tape recorder*, TV, VCD), dan media cetak.

Keteladanan, pujian, larangan, sanksi, latihan, pembiasaan, nasihat, dialog, imbauan, dan dorongan serta contoh merupakan metode pendidikan yang dapat digunakan pendidik untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai dalam pribadi anak. Keteladanan merupakan cara mendidik paling ampuh dan efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak secara moral dan sosial (Ulwan, 1992: 2). Seorang pendidik adalah contoh ideal dalam pandangan anak, semua perilaku pendidik akan ditiru dan menjadi acuan anak dalam berperilaku. Melatih dan membiasakan anak pada perilaku bermuatan nilai adalah faktor penunjang yang penting dalam membudayakan nilai-nilai demokrasi. Dengan kata lain perilaku yang bermuatan nilai perlu disosialisasikan, dilatih dan dibiasakan pada anak. Adapun larangan dan hukuman diperlukan untuk meluruskan atau memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak pantas. Larangan, hukuman, nasihat serta pujian akan memberikan arah bagi perilaku yang boleh dilakukan. Suatu hal yang perlu dilakukan pendidik dalam menumbuhkan nilai, adalah mensosialisasikan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya memberi contoh dan membiasakan perilaku yang diinginkan tersebut. Mubarak (2001: 85) mengemukakan, untuk membinakan nilai, dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang nilai, lingkungan yang kondusif, membangun tokoh idola serta pembiasaan pada tingkah laku yang konstruktif. Metode pendidikan yang ditopang oleh pemanfaatan pengalaman seputar kehidupan sehari-hari, akan membantu anak untuk mampu mengidentifikasi dan memahami nilai melalui perasaannya. (Sridhar, 2004: 4).

Selain menggunakan metode-metode di atas, pendidik dapat pula memanfaatkan pendekatan pengembangan nilai. Menurut Superka dalam Sidhar (2004: 5) dan Djahiri (1985: 40-42) ada delapan pendekatan yaitu: (a) *evocation*, (b) *inculcation*, (b) *awareness*, (e) *moral reasoning*, (d) *analysis*, (e) *value clarification*, (f) *commitment*, (g) *the union approach*.

Pendekatan klarifikasi nilai (*value clarification approach*), menekankan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri. Pendekatan ini akan meningkatkan kesadaran anak tentang nilai-nilainya sendiri. Tugas pendidik menurut pendekatan ini ada tiga, yaitu: (1) membantu anak untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilainya sendiri dan nilai-nilai orang lain, (2) membantu anak supaya mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, baik dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan nilainya sendiri, (3) membantu anak supaya dapat menggunakan kemampuan rasional dan kesadaran emosional, untuk memahami perasaan, nilai, dan pola tingkah lakunya sendiri (Superka. et. al, 1978). Dalam pelaksanaannya pendekatan ini menggunakan dialog atau diskusi.

Pendekatan komitmen (*commitment approach*), memungkinkan anak untuk menyadari dirinya sendiri. Penyadaran diri ini tidak hanya secara pasif atau menyadari dirinya sebagai individu yang bebas mutlak. Namun ia dituntun untuk menyadari bahwa ia adalah anggota dalam suatu kelompok sosial dan dalam kesatuan suatu sistem sosial. Suatu tindakan akan dapat membantu anak memperjelas dan membangun sistem nilai. Tindakan itu juga dapat digunakan untuk memastikan kesungguhan komitmennya terhadap nilai-nilai itu.

Pendekatan penyatuan (*union approach*), bertujuan untuk membantu anak menyadari bahwa diri dan tindakannya tidak dapat terpisah dari lingkungannya. Sebagai makhluk sosial ia adalah bagian dari hubungan antar sesama dalam lingkungan budaya, masyarakat, bangsa dan umat dunia. Pendekatan ini menekankan pada upaya pemberian kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral. Baik secara perorangan maupun secara bersama-sama berdasarkan nilai-nilainya sendiri. Selain itu, juga mendorong anak untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama. Sebagai makhluk sosial, ia tidak memiliki kebebasan secara mutlak, melainkan ia harus sadar bahwa setiap individu dituntut memiliki toleransi pada sesama dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pendekatan ekspresi bebas (*evocation approach*) memberi kebebasan dan kesempatan sepenuhnya pada anak untuk mengekspresikan atau mengemukakan tanggapan, perasaan, penilaian dan pandangannya tentang sesuatu yang diperagakan atau yang dikemukakan pendidik. Pandangan itu bahkan boleh bersifat positif dan negatif.

Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), memberikan penekanan pada penanaman nilai budaya. Menurut Superka (1976) tujuan pendekatan ini agar, (1) diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh anak, dan (2) berubahnya nilai-nilai anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang diinginkan. Tindakan penguatan positif dan negatif yang dilakukan pendidik akan membantu menanamkan nilai-nilai itu. Aktivitas penanaman nilai dapat dilakukan melalui respons dan tindakan secara alami.

Pendekatan kesadaran (*awareness approach*), membantu anak menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka. Anak diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman-pengalamannya. Pada pendekatan ini pendidik mengajukan situasi-situasi yang bermuatan nilai atau dilema nilai melalui dialog, simulasi dan pemeranan. Dengan cara ini anak akan membuat kesimpulan tentang nilai-nilai atau perilaku-perilaku mereka dan orang lain melalui proses pemikiran, perasaan dan keyakinan.

Pendekatan perkembangan kognitif (*moral reasoning approach*), memiliki karakteristik yang menekankan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral dari tingkat yang lebih rendah menuju tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989 dalam Zakaria, 2004: 4). Proses pengajaran nilai menurut pendekatan ini berdasarkan pada dilema moral dengan menggunakan diskusi dan dialog. Dialog dilakukan dengan memberikan perhatian pada tiga kondisi. *Pertama*, mendorong anak menuju tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi. *Kedua*, adanya dilema, baik dilema hipotetikal maupun dilema faktual yang berhubungan dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, suasana yang dapat mendukung bagi berlangsungnya dialog dengan baik.

Pendekatan analisis (*analysis approach*), memberikan penekanan perkembangan kemampuan anak untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dalam lingkungan kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pembinaan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran PPKn di kelas dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa pendekatan dan strategi yang sesuai dengan materi pelajaran, dan misi nilai yang terkandung dalam materi tersebut.

Nilai-nilai demokrasi penting disosialisasikan pada anak didik melalui keteladanan contoh, dan pembiasaan dalam setiap perilaku dan bersikap pada setiap kegiatan pengajaran di kelas.

Nilai-nilai demokrasi sangat perlu dibinakan dan diinternalisasikan pada anak didik agar ia mampu hidup berdampingan dengan sesama dalam damai dan harmoni dalam masyarakat lokal, nasional dan global.

Pembinaan nilai-nilai melalui pembelajaran PPKn harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan berpikir anak didik

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Partispatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bybee, R. W. Sund. (1982). *Piaget for Educator* Second Edition. Ohio: Charles E. Merrill Publishing. Co. Bell & Howel Company All rights.
- Fraenkel, J.R. (1977). *How to Teach about Values : An Analytic Approach*. Englewood Cliff, New Jersey : prentice Hall Inc.
- Mubarok, A. (2001). *Psikologi Qur'ani*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Seetharam, A.R. (2004). Concept and Objectives of Value Education. (Online). Tersedia : <file:///J:/objective.htm>. (22 juni 2004)
- Schultz, D. (19 86). *Theories of Personality*. Third Edition. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Sridhar, Y.N. (2004). Methodology of Value Education. (Online). <file:///J:/Value Orientation in Teacher Education>. (22 Juni 2004)
- Sridhar, Y.N. (2004). Value Development. (Online). Tersedia : <file:///J:/moral.htm>. (22 Juni 2004).
- Suparmo, Paul. 2000. 'Kurikulum SMU yang Menunjang Pendidikan Demokrasi' dalam Sindhunata (ed.). 2000. *Membuka Masa depan Anak-Anak Kita: Mencari Kurikulum Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zakaria, T.R. (2001). Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai Dan Implementasi Dalam Pendidikan Budi Pekerti. (Online). Tersedia : Portal informasi Pendidikan Indonesia. www.depdiknas.go.id/pendekatan_prndidikan_teuku_ramli.htm. (22 Oktober 2004)
- Zamroni. 2000. *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju CivilSociety*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.